RENCANA STRATEGIS
Dinas Kesehatan Kota Metro



Tahun

- 2025
- 2029

Dinas Kesehatan Kota Metro
Jl. Jend. A. Yani No. 02 Kota Metro

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i
DAFTAR GAMBAR.....ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 5
1.3.2 Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kota Metro 7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Metro..... 15
2.1.3 Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Metro 16
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Metro 17
2.2.1 Indikator Kinerja Utama 17
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci 18
2.2.3 Standar Pelayanan Minimal..... 22
2.3 Identifikasi Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Metro. 24
2.4 Telaah Dokumen Perencanaan Kebijakan Terkait 28
2.4.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan..... 28
2.4.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 29
2.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 30
2.5 Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro.... 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.. 34
3.1 Tujuan dan Sasaran 34
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan..... 37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN 43
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan 43
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan 70
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah 87
4.4 Indikator Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro.. 90
BAB V PENUTUP..... 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro 8
Gambar 2.3 Sasaran Strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024 15
Tabel 2.2 Sarana Kesehatan di Kota Metro Tahun 2024 16
Tabel 2.3 Perkembangan Pembiayaan Kesehatan Kota Metro Tahun 2020 - 2024 17
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024 18
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kesehatan Kota Metro 19
Tabel 2.6 Capaian SPM Bidang Kesehatan 22
Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029 29
Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro..... 32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Metro..... 35
Tabel 3.2 Tahapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro..... 38
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro . 39
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro 49
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Metro 71
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro..... 87
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro. 91
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Metro .. 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045. Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh kemantapan sarana dan prasarana, SDM berkualitas dan berdaya saing, situasi sosial yang kondusif, perekonomian lokal yang kokoh dan lingkungan yang *sustainable* dengan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya/ perilaku masyarakat seutuhnya.

Tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan masyarakat melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap berbagai ancaman kesehatan;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH).

Sehubungan dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025 – 2029 yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan perencanaan dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan selama 5 (lima) tahun dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai visi dan misi daerah melalui tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunaan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, menyediakan ukuran keberhasilan birokrasi, menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, acuan dalam penilaian kinerja OPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal, dan wujud kontrak Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.

Renstra OPD, dalam hal ini Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro, merupakan penjabaran RPJMD Kota Metro ke dalam OPD Dinas Kesehatan dan terintegrasi antar program-program yang sudah direncanakan di dalam RPJMD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Sinergitas dan harmonisasi antara Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Renstra Kementerian Kesehatan dilakukan agar Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan bisa terakomodir dan terarah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025-2029 dalam implementasinya dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang penyusunannya dilakukan setiap 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, lintas sektor, dan stakeholder terkait.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025 – 2029 terdiri dari:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2045;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025 – 2045;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro adalah sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2025 – 2029 yang disusun secara sistematik untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan selama 5 tahun ke depan bagi Dinas Kesehatan Kota Metro, lintas sektor, stakeholder bidang kesehatan, dan seluruh komponen masyarakat di Kota Metro. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kesehatan tahunan dan lima tahunan, serta menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Metro dan stakeholder terkait selama tahun 2025-2029.
2. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan Kota Metro secara umum dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro secara khusus.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaku pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya. Selain itu, terdapat uraian tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro serta sistematika penulisan untuk memudahkan pembahasan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA METRO

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro beserta sumber dayanya, menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Metro, Telaahan Visi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategi Kementrian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Lampung serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro**.**

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Metro yang ingin dicapai serta menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta, indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya serta menguraikan tentang target indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2025 – 2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

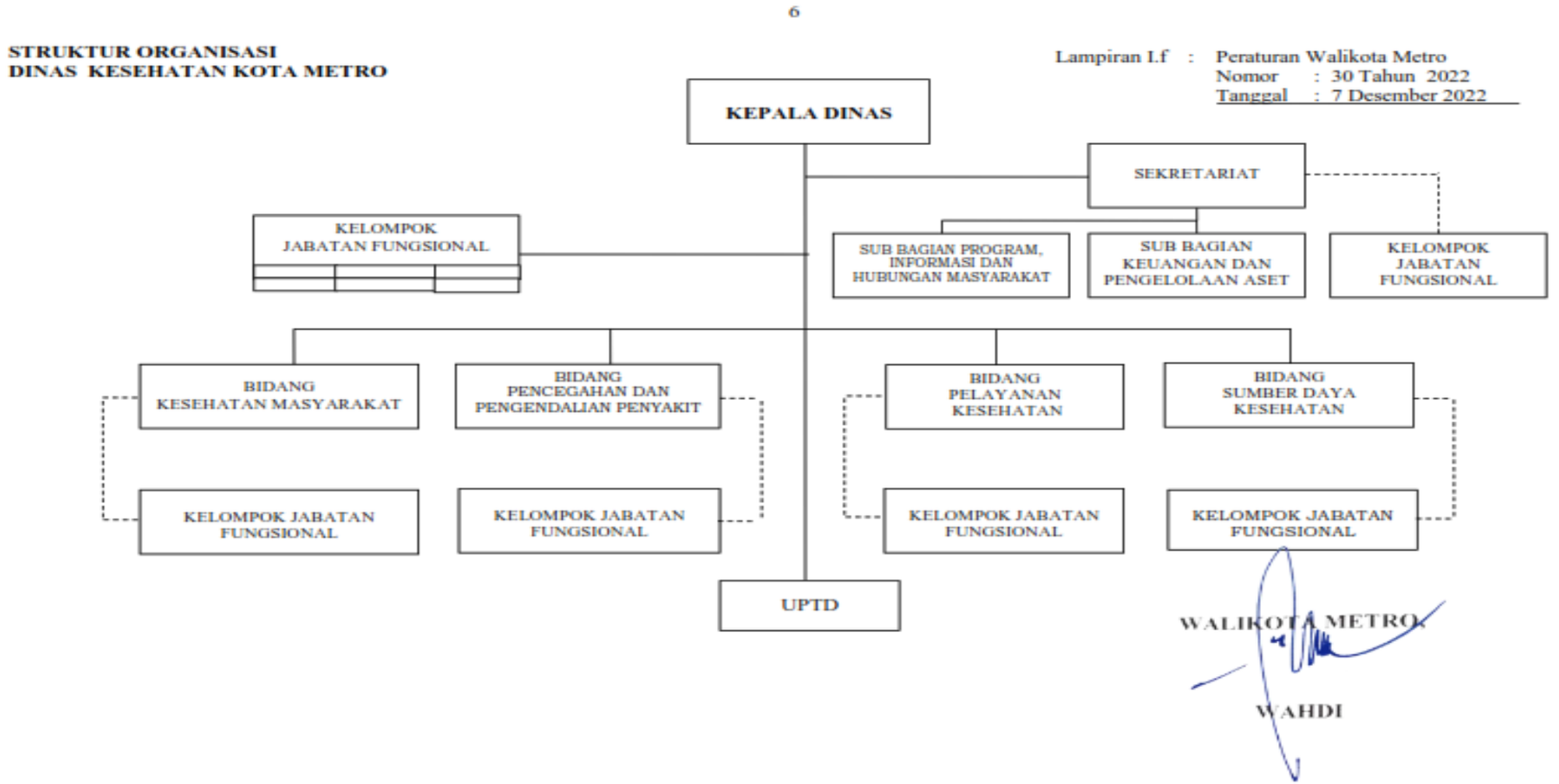
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Dinas Kesehatan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Sekretariat, bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Kesehatan;
c. Pembinaan, pengendalian, monitoring, pengawasan, koordinasi dan evaluasi bidang kesehatan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro



Sumber : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro

Adapun uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Maetro berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, Sumber Daya Kesehatan dan UPTD;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Kesehatan;
c. Pembinaan, pengendalian, monitoring, pengawasan, koordinasi dan evaluasi bidang kesehatan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan tugas dan perencanaan prioritas sasaran kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja Dinas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Pendistribusian dan pembagian tugas serta tanggung jawab kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat;
c. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pengevaluasian hasil kerjabawahan danmemberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Pemberian pertimbangan konsep surat/naskah dinas dari bawahan dan bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPTD;
f. Penyelenggaraan kegiatan program, informasi, hubungan masyarakat, penatausahaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
g. Penyelenggaraan rumusan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi, penyusunan program, informasi kesehatan, serta evaluasi dan pelaporan;
h. Penyelenggaraan rumusan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi, penata usahaan keuangan, dan Pengelolaan Aset;
i. Penyelenggaraan rumusan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas, Kepegawaian, produk hukum;
j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat;
k. Pengevaluasian tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dinas secara lisan dan tertulis kepada Atasan; dan
l. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pengembangan program kesehatan, perumusan

kebijakan, penetapan sistem kesehatan, pengumpulan dan analisis data, penyelenggaraan sistem Informasi kesehatan, evaluasi program dan pelaporan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program kesehatan dan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan;
b. Menyiapkan dan mengelola bahan untuk pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengelolaan, dan analisis serta penyajian data dan informasi kesehatan;
c. Menyiapkan pelaksanaan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Informasi Kesehatan;
d. Melaksanakan tugas kehumasandinas dan tata laksana SOP;
e. Melakukan pembinaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi program pembangunan kesehatan;
f. Menyiapkan bahan, menyusundan melaksanakan pengumpulan data, analisis data dan laporan yang berasal dari UPTD Puskesmas;
g. Mengkordinasikan dan menyusun laporan kinerja program, Profil Kesehatan, Rencana kerja, Rencanan Tahunan Kesehatan, Perencanaan berbasis elektronik, LKPJ, LPPD, DHA, SAKIP, SPM, SIK, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas, penyiapan bahan pelayanan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta pengelolaan aset daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan, menyusundan melaksanakan penatausahaan keuangan, dokumentasi keuangan, laporan fisik dan keuangan,analisis data, monitoring dan evaluasi,

bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

b. Menyiapkan bahan menyusun dan melaksanakan rekonsiliasi sistem akuntansi;
c. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan bidang kesehatan lainnya;
d. Melaksanakan pengusulan dan pembayaran gaji/honor seluruh pegawai yang terdiri dari PNS, CPNS, dan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan;
e. Menyusun dan melaksanakan inventarisasi dan Pengelolaan aset Dinas Kesehatan;
f. Menyiapkan bahan Laporan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
g. Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pengumpulan data, analisis data dan laporan yang berasal dari UPTD Puskesmas; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, kesehatan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, kesehatan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, kesehatan gizi masyarakat, promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, kesehatan gizi masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, serta Mutu dan Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan kebijakan operasionaldi bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, serta Mutu dan Perizinan;
b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, serta Mutu dan Perizinan;
c. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan, serta Mutu dan Perizinan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Sumber Daya Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
e. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Metro

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Metro pada tahun 2024 adalah sebanyak 473 orang. SDM tersebut bertugas di Dinas Kesehatan dan 11 UPTD Puskesmas. Uraian SDM Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 SDM Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN		GOLONGAN		JUMLAH JABATAN	
					STRUKTURAL	FUNGSIONAL
473	S2	22	I	0	19	365
	S1	129	II	88		
	DIII	224	III	203		
	DI	0	IV	29		
	SLTA	12				
	SLTP	0				
	SD	0				
	Lain-lain	4				

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

2.1.2.2 Sarana Kesehatan

Dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro, terdapat 231 sarana pelayanan

kesehatan, baik sarana milik Pemerintah Kota Metro maupun milik swasta. Adapun sarana kesehatan tersebut terdiri dari rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas, Pustu dan puskesmas keliling), sarana pelayanan lain (klinik, praktek dokter perorangan, praktek pengobatan tradisional, bank darah rumah sakit dan unit tranfusi darah), serta sarana produksi dan distribusi kefarmasian (pedagang besar farmasi, apotek, toko obat dan toko alat kesehatan), yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Sarana Kesehatan di Kota Metro Tahun 2024

NO	FASILITAS KESEHATAN	KEPEMILIKAN		JUMLAH
		PEM. KAB/ KOTA	SWASTA	
Rumah Sakit				
1	Rumah Sakit Umum	2	5	7
2	Rumah Sakit Khusus		2	2
Puskesmas Dan Jaringannya				
1	Puskesmas Rawat Inap	1		1
2	Puskesmas Non Rawat Inap	10		10
3	Puskesmas Pembantu	5		5
Sarana Pelayanan Lain				
1	Klinik Pratama		34	34
2	Klinik Utama		3	3
3	Praktik Dokter Umum Perorangan		24	24
4	Praktik Dokter Gigi Perorangan		24	24
5	Praktik Dokter Spesialis Perorangan		31	31
6	Praktik Mandiri Bidan		16	16
7	Praktik Mandiri Perawat		2	2
8	Unit Transfusi Darah		1	1
9	Laboratorium Kesehatan		2	2
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian				
1	Apotek		79	79
2	Toko Obat		4	4
3	Toko Alkes		1	1

Sumber: Profil Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

2.1.3 Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Metro

Pembiayaan kesehatan merupakan seluruh proses pengalokasian dan penggunaan sumber daya keuangan untuk

menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkesinambungan. Secara umum, pembiayaan program pembangunan kesehatan di suatu kabupaten/kota berasal dari berbagai sumber antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi, dan APBD pemerintah kabupaten/kota, serta pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Secara khusus, perkembangan pembiayaan kesehatan Kota Metro tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perkembangan Pembiayaan Kesehatan Kota Metro Tahun 2020 - 2024

No.	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN ANGGARAN (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	APBD Kab/Kota	415,132,737,402	305.635.576.747	316.134.902.064	318.062.049.597	403.725.664.035
2.	APBD Provinsi	0	0	0	0	0
3.	APBN	0	0	0	0	0
4.	PHLN	17.610.000	48.671.400	84.007.000	133.710.450	39.553.950
5.	Sumber lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	**415.150.347.402**	**305.684.248.147**	**316.218.909.064**	**318.195.760.047**	**403.765.217.985**

Sumber : Profil Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan kesehatan di Kota Metro bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan PHLN yang merupakan dana hibah bersumber *Global Fund*. Alokasi dana terbesar secara konsisten berasal dari APBD Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pemerintah pusat ke daerah (DAU, DAK).

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Metro

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atascapaian indikator kinerja sasaran. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Metro juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2024 menunjukkan hasil berikut:

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98%	99,76%	101,8%	Baik Sekali
2	Angka Harapan Hidup	72,18	75,43	104,5%	Baik Sekali
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	2	0	100%	Baik
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	10	14	71,4%	Cukup
5	Prevalensi Stunting pada Anak Balita	8,50%	3,45%	246,4%	Baik Sekali
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TBC) *(suscces rate)*	95%	95,29%	100,3%	Baik Sekali
7	Prevalensi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	94%	94%	100%	Baik
8	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	96%	100%	104,2%	Baik Sekali
9	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,4	114,3%	Baik Sekali

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Berikut capaian IKK Urusan Kesehatan Kota Metro:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci urusan Kesehatan Kota Metro

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83.54%	85%	95.72%	90%	99.41%	95%	102.22%	98%	99.76
Angka Harapan Hidup	71.63	71.76	71.66	71.9	71.88	72.04	75.14	72.18	75.43
Jumlah Kasus Kematian Ibu	0	3	5	3	0	3	0	2	0
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5.03	5.03	5.4	4.76	0.79	4.76	3.1	4.41	5.4
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4.64	4.64	4.15	4.36	1.18	4.36	2.8	4.01	5.0
Angka Kematian Neonatal (AKN) per1000 kelahiran hidup	4.64	4.64	3.32	3.57	3.94	3.57	2.4	3.21	4.7
Prevalensi stunting pada anak balita	9.91%	9.91%	7.30%	9.50%	6.67%	9%	0.0407	8.50%	4.10%
Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	19.82%	12.99%	27.32%	12.99%	25.30%	12.99%	0.275	12.99%	20.07%
Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	208.25	228.34	273.66	214.3	274.3	194.39	412.93	186.69	393.83
Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 pilar	2 pilar	1 Pilar	2 pilar	5 pilar	3 pilar	5 pilar	3 pilar	5 pilar
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18.20%	18.20%	18.18%	18.20%	18.18%	81.80%	100.00%	100.00%	100.00%
Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi Paripurna	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna
Persentase balita wasting	4.10%	6%	5.45%	5.80%	5.26%	5.60%	4%	5.40%	3.10%

Persentase ibu hamil KEK	17%	15%	8.73	14%	5.91%	12%	9%	11%	8%
Persentase anemia pada ibu hamil	16.71%	20%	21.02	19%	16.52%	18%	13%	17%	6%
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	89.20%	100	94.22%	100	100%	100	100%	100%	100%
Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	94.90%	95%	94.86%	95%	96.64%	95%	97%	95%	95%
Angka kesakitan (incidence rate) DBD per 100.000 penduduk	87.31	77.28	80.18	71.63	50.4	67.81	67.80	64.09	418.3
Prevalensi HIV AIDS	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.26%	0.01%	0.10%
Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	2.20%	21.80%	1.64%	21.80%	17.20%	21.80%	70%	21.80%	20.62%
Persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun	N/A	9.10%	2.68%	9%	14.20%	8.90%	7.60%	8.80%	21.69%
Cakupan IDL/ Imunisasi Dasar Lengkap	60.80%	95%	82.64%	95%	98.80%	95%	103%	95%	103%
Cakupan Kelurahan UCI/ Universal Child Immunisation	18%	100%	77.27%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%
Pencapaian tatanan Kota Sehat (5 tatanan)	0 tatanan	3 tatanan	0 tatanan	3 tatanan	0 tatanan	4 tatanan	9 tatanan	4 tatanan	9 tatanan
Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar	51%	53%	68.60%	55%	52%	57%	69.99%	59%	91%
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90%	91%	91%	92%	91%	93%	93%	94%	#REF!
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86%	90%	100%	92%	100%	94%	100%	96%	100%
Persentase Industri Rumah Tangga bersertifikat PIRT	60 PIRT	180 PIRT	46 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT

Indikator Keluarga Sehat (IKS)	0.22	0.27	0.23	0.27	0.376	0.35	0.004	0.35	0.4
Jumlah kelurahan menerapkan kebijakan GERMAS	22	22	22	22	22	22	22%	22	22

Sumber : Sub.Bagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Metro

2.2.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan dasar dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan mengampu 12 (dua belas) indikator SPM. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Metro dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.6 Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	SPM Bidang Kesehatan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	92.19%	96.68%	101.88%	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	89.20%	94.41%	100.11%	100%	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	89.01%	95.56%	102.53%	100%	100%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	66.84%	93.21%	94.13%	100%	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	78.40%	85.00%	100.00%	100%	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	36.34%	77.07%	100.85%	100%	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	82.40%	100.00%	105.99%	100%	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	139.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	243.60%	102.65%	100.00%	100%	104.90%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	103.82%	100.00%	100.00%	100%	130.00%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	94.37%	83.79%	105.02%	100%	100.00%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	111.38%	103.54%	117.89%	100%	100.00%

Sumber : Sub.Bagian Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Metro

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capain pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan di Kota Metro sudah mencapai 100%. Hal ini menggambarkan komitmen Kota Metro untuk terus memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar minimal.

Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan merupakan pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kebijakan kesehatan. Identifikasi kelompok ini bertujuan memastikan layanan yang diberikan tepat sasaran, efektif, dan berdaya guna. Dalam dokumen ini, kelompok sasaran dikelompokkan berdasarkan pendekatan sistematis untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat serta institusi yang berperan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan. Dinas Kesehatan dapat mengisi kelompok sasaran layanan berdasarkan kategori berikut:

1. **Individu dan Keluarga:**
    a) Ibu hamil
    b) Ibu bersalin
    c) Bayi baru lahir
    d) Balita
    e) Anak usia Pendidikan dasar
    f) Usia produktif (15-59 tahun)
    g) Usia lanjut (diatas 60 tahun)
2. **Komunitas dan Kelompok Sosial:**
    a) Posyandu
    b) Sekolah
    c) Usaha Kesehatan Kerja
    d) Saka bhakti husada
    e) PMI
    f) YKI
    g) YJI
    h) Kopi TB
    i) Organisasi profesi kesehatan
3. **Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur:**
    a) Rumah Sakit
    b) Puskesmas
    c) Pustu
    d) Poskeskel
    e) Klinik
    f) Praktek Tenaga Medis

g) Laboratorium Kesehatan
h) Apotek
i) Toko Alat Kesehatan

4. Lembaga Pemerintah, Swasta, Industri:

a) Pemerintah Daerah
b) DPRD
c) Yayasan
d) Lembaga Swadaya Masyarakat

2.3 Identifikasi Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Metro

Kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan di Indonesia, tak terkecuali di Kota Metro. Pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Metro, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

2.3.1 Tingginya angka kematian bayi yaitu 5,0 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Jumlah kematian bayi di Kota Metro mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 10 kematian bayi, meningkat menjadi 13 kematian bayi di tahun 2021, kemudian menurun menjadi 7 kematian bayi di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan kematian bayi menjadi 14 kematian dari 2.785 kelahiran hidup atau sekitar 5,0 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Tingginya kematian bayi pada tahun tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi asfiksia (54%), BBLR (16%), dan kelainan kongenital (11%).

Permasalahan utama lainnya adalah masih minimnya sarana dan prasarana untuk penanganan bayi berisiko tinggi di fasilitas rujukan termasuk tenaga terlatih di NICU dan resusitasi. Selain itu, terdapat faktor meningkatnya kasus ibu hamil anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK) pada tahun 2024, serta keterlambatan mengambil keputusan dalam keluarga akibat rendahnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak.

2.3.2 Rendahnya status gizi masyarakat ditunjukkan dengan prevalensi stunting pada balita mencapai 14,8%

Rendahnya status gizi masyarakat di Kota Metro ditunjukkan dengan prevalensi stunting balita di Kota Metro yang sangat fluktuatif dari tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kota Metro tercatat sebesar 19,7% (SSGI, 2021). Angka ini kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 10,4% (SSGI, 2021), bahkan terus menurun hingga mencapai 7,1% pada tahun 2023 (SKI, 2023). Namun, pada tahun 2024 angka prevalensi stunting kembali meningkat tajam dan mencapai 14,8% (SSGI, 2024). Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita juga tergolong tinggi dan mencapai 9,2% pada tahun 2024.

Tingginya prevalensi stunting dan wasting pada balita di Kota Metro mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan program intervensi gizi spesifik dan sensitif, pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk faktor determinan seperti asupan gizi, pola asuh, sanitasi, serta akses pelayanan kesehatan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya penurunan stunting Kota Metro antara lain:

1. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak dapat berjalan maksimal karena masyarakat tidak rajin datang ke posyandu. Di sisi lain, petugas kesehatan memiliki keterbatasan SDM dan anggaran untuk dapat melakukan kunjungan rumah pada balita yang tidak datang ke posyandu.
2. Meningkatnya kasus ibu hamil anemia dan KEK serta kondisi kehamilan berisiko tinggi yang tidak terpantau.
3. Kurangnya pemahaman keluarga menganai pemberian ASI eksklusif dan pemberian MPASI berkualitas yang mencukupi kebutuhan gizi balita.

2.3.3 Masih tingginya risiko kematian ibu

Meskipun pada tahun 2022 hingga 2024 tidak ada kasus kematian ibu, permasalahan kematian ibu tetap menjadi isu utama dalam pembangunan kesehatan. Hal ini karena kematian ibu merupakan indikator yang sangat sensitif terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan nifas serta memengaruhi derajat kesehatan masyarakat di suatu

kabupaten/kota. Data historis Kota Metro menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 5 kematian ibu dari 2.409 kelahiran hidup atau sekitar 207,6 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Tren kematian ibu pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa risiko tersebut masih ada, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencegah kematian ibu.

2.3.4 Kurang optimalnya pengendalian penyakit menular Tuberkulosis, cakupan notifikasi kasus 71%

Pengendalian penyakit menular Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan besar di Kota Metro. Hal ini terlihat dari cakupan penemuan/ notifikasi kasus TBC yang baru mencapai 71%, sehingga masih terdapat sekitar hampir sepertiga kasus TBC di masyarakat yang belum terdeteksi dan berpotensi menjadi sumber penularan. Berbagai tantangan dan permasalahan yang ditemukan dalam pengendalian penyakit TBC antara lain:

1. Keterbatasan alat dan bahan medis untuk deteksi dini yang disebabkan pembiayaan program TBC masih sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat (DAK Nonfisik).
2. Kurang optimalnya skrining pada kelompok berisiko dan investigasi kontak terhadap kasus TBC.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan gejala penyakit TBC dan kesadaran untuk memeriksakan diri.
4. Belum optimalnya kapasitas SDM kesehatan dalam mendiagnosa TB Paru (kurang sensitif).
5. Sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
6. Meningkatnya jumlah kasus TBC Resistan Obat (TBC-RO) yang menjadi krisis kesehatan masyarakat dan ancaman keamanan kesehatan.

2.3.5 Rendahnya keaktifan peserta JKN yaitu 83,79%

Rendahnya keaktifan peserta JKN di Kota Metro yaitu sebesar 83,79% pada tahun 2024, dari total cakupan kepesertaan JKN yang mencapai 99,87%. Peserta aktif adalah peserta yang telah membayar atau dibayarkan iurannya sampai dengan bulan berjalan

sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat menggunakan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan. Rendahnya cakupan peserta aktif JKN ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN, namun tingkat keaktifannya masih belum optimal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, mengingat kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

2.3.6 Rendahnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi prioritas nasional

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program unggulan dan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12/2025) sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas SDM melalui intervensi preventif. Pada tahun 2025 pemerintah pusat menargetkan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjangkau >80% populasi target di seluruh kabupaten/kota atau paling kurang 60 juta penerima. Pemeriksaan Kesehatan Gratis ditargetkan menurunkan angka *stunting*, mendeteksi lebih dini penyakit katastropik, memperkuat budaya hidup sehat, dan mengurangi biaya rumah tangga akibat keterlambatan diagnosis.

Hingga 28 Agustus 2025, cakupan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Metro sendiri baru mencapai 13.586 penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk. Capaian ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan yaitu 20% di tahun 2025. Berbagai tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan
2. Keterbatasan tenaga kesehatan untuk dapat menjangkau/ jemput bola kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Keterbatasan alat dan bahan medis habis pakai untuk melakukan skrining dan deteksi dini penyakit.

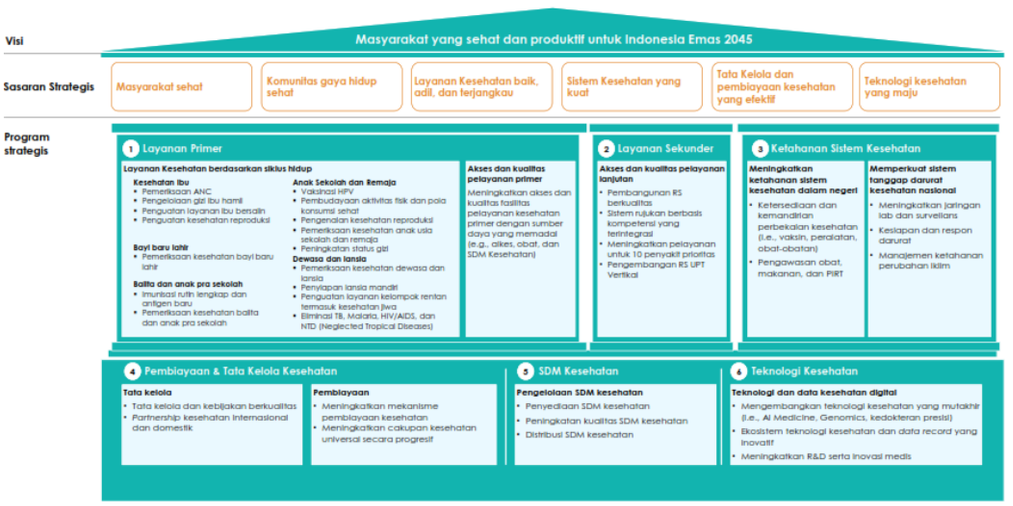
2.4 Telaah Dokumen Perencanaan Kebijakan Terkait

2.4.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun alokasi anggaran kesehatan sesuai program kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Saat ini, RIBK 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 (Perpres No. 12/2025). Sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam RIBK 2025-2029 dengan program kesehatan di daerah, telah ditentukan indikator kinerja kesehatan yang perlu dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah (PD) 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 Juli 2025 dengan Nomor: PR.01.01/A/2952/2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.

Gambar 2.2 Sasaran Strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan





Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

2.4.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dalam rangka mencapai Visi Gubernur "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", akan dicapai melalui 3 (tiga) misi, dimana OPD Dinas Kesehatan berkontribusi kedalam Misi yang kedua yaitu "Memperkuat Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Produktif" dengan tujuan "Menuju zero stunting dan mewujudkan masyarakat sehat".

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2025	2026	2027	2028	2029
Menuju zero stunting dan mewujudkan masyarakat sehat	Meningkatnya Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup	74,55	74,74	74,93	75,12	75,31
	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14,2%	13,5%	12,8%	12,1%	11,5%

Sumber: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Adapun Sasaran Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam rangka mencapai Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan AKI
2. Menurunkan AKB
4. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
5. Menurunkan Kasus Penyakit Menular
6. Menurunkan Kasus Penyakit Tidak Menular
7. Meningkatkan Keaktifan Peserta JKN
8. Meningkatkan Pemerataan Tenaga Kesehatan
9. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

2.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 (Pemerintah Kota Metro, 2024), isu strategis berkaitan dengan pembangunan kesehatan Kota Metro yaitu:

1. Masih adanya potensi malnutrisi atau kekurangan gizi
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah masyarakat.

Sementara rekomendasi arah kebijakan dalam dokumen tersebut meliputi:

1. Mengintensifkan sosialisasi penyuluhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan
2. Mendorong pelaporan aktif dan transparan dari fasilitas kesehatan dan penyedia layanan.
3. Membangun dan memperluas pusat kesehatan yang terjangkau dan berkualitas di berbagai wilayah kota untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
4. Memastikan pusat kesehatan menyediakan layanan kesehatan primer yang lengkap, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan perawatan prasejahteraan.

5. Mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk pelatihan dan sertifikasi tenaga medis.
6. Meningkatkan ketersediaan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan di pusat kesehatan.
7. Melakukan program edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat, perawatan prenatal, dan pencegahan penyakit.
8. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, termasuk pemahaman pentingnya perawatan prenatal dan postnatal.
9. Mengadakan kampanye penyadaran kesehatan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan yang berkualitas.

2.5 Penentuan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kota Metro serta telaah dokumen perencanaan kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, isu strategis pada Dinas Kesehatan Kota Metro dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kolaborasi secara *pentahelix* dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan angka kematian bayi dan balita serta stunting pada balita	1.Tingginya angka kematian bayi yaitu 5,0 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2.Rendahnya status gizi masyarakat, prevalensi stunting balita 14,8% dan prevalensi wasting balita 9,2%. 3.Masih tingginya risiko kematian ibu, meskipun pada tahun 2022-2024 tidak ada kasus kematian ibu. 4.Kurang optimalnya pengendalian penyakit TBC, cakupan	1. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian	1. Menurut UNICEF diperkirakan 4,8 juta anak meninggal sebelum mencapai ulang tahun kelima mereka pada tahun 2023. Ini termasuk 2,3 juta bayi baru lahir yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan dan 2,5 juta anak berusia 1–59 bulan.	1. Tren angka kematian bayi (AKB) di Indonesia pada tahun 2024 masih menjadi perhatian, dengan target penurunan yang belum tercapai sesuai dengan standar Sustainable Development Goals (SDGs) 2. Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 adalah 19,8% berdasarkan	3 Menuju zero stunting dan perwujudan masyarakat sehat, target menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,85% tahun 2030. 4 Komitmen menuju Lampung Merdeka TBC 2030, target penemuan kasus TBC	Terhambatnya penciptaan SDM unggul yang memerlukan upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan penguatan mutu pelayanan kesehatan

	notifikasi kasus TBC hanya 71%. 5. Rendahnya keaktifan peserta JKN yaitu 83,79%. 6. Rendahnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. 7. Ketiadaan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pengadaan obat dan BMHP. 8. Peningkatan kapasitas RSUD untuk memenuhi standar pelayanan KJSU (kanker, jantung, saraf, urologi)	Balita 25 per 1000. 2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, dan mencegah stunting pada balita.	2. Berdasarkan data WHO tahun 2024, prevalensi stunting di dunia mencapai 22,3% atau sekitar 148,1 juta balita. 3. Komitmen PBB untuk mengakhiri epidemi TBC tahun 2030 dengan target penurunan 90% jumlah kematian TBC dan penurunan sebesar 80% angka insidensi TBC.	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan 3. Program Makan Bergizi Gratis 4. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjangkau >80% populasi target di seluruh kabupaten/kota. 5. Transformasi Layanan Rujukan peningkatan akses dan mutu layanan RS untuk penyakit prioritas nasional (KJSU).	mencapai 90% tahun 2030.	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan kesehatan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Kesehatan.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dijadikan landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan rumusan Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“METRO KOTA CERDAS BERBASIS JASA DAN BUDAYA YANG RELIGIUS”

Rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan dalam Misi. Adapun Misi Pembangunan yang berkaitan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Adalah “Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter”.

Rumusan tujuan dan sasaran Renstra merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik layanan kesehatan		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	108	108	72	72	72	72	
			Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	5,0	5,4	5,1	4,8	4,6	4,2	4,0	
			Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	9,2%	8,7%	8,2%	7,7%	7,2%	6,7%	6,2%	
			Cakupan notifikasi kasus tuberkulosis	71%	72%	75%	80%	85%	90%	90%	
			Cakupan keaktifan peserta JKN	83,79%	85,74%	86,24%	86,54%	86,74%	86,84%	87%	
			Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	0%	20%	50%	70%	90%	100%	100%	

		S1.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit yang berkualitas	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	5,39	10	8	7	6	5	5	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*	95,29%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	
			Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	0,71%	0,75%	1%	1%	1%	1%	1%	
		S1.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai SAKIP	80,35	80,40	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65	
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	55%	60%	70%	80%	90%	95%	95%	
			Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL	100%	90%	95%	95%	95%	98%	98%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,11	83,50	84,00	84,50	84,75	85,00	85,25	

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra dinas Kesehatan. Strategi Dinas Kesehatan Kota Metro dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah percepatan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan penguatan mutu pelayanan kesehatan.

Adapun penahapan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025-2029 dijabarkan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Kesehatan ibu dan anak menuju metro sehat	Peningkatan fasilitas layanan Kesehatan berkualkitas dan merata	Terwujudnya Integrasi layanan Kesehatan primer dan rujukan	Penciptaan layanan Kesehatan cerdas	Perwujudan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak 2. Penguatan sistem rujukan 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	1. Peningkatan infrastruktur 2. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 3. Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan 4. Pemerataan layanan kesehatan 5. Peningkatan mutu layanan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor	1. Pelaksanaan Integrasi layanan primer baik di puskesmas dan posyandu 2. Peningkatan kapasitas rujukan	1. Transformasi teknologi kesehatan	1. Penguatan sistem kesehatan primer 2. Kampanye hidup sehat 3. Pemberdayaan masyarakat

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kesehatan di Kota Metro tahun 2025 - 2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Pada Layanan Kesehatan Serta Pemerataan Layanan Kesehatan Berkualitas Pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.	a. Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. b. Mendorong puskesmas dan RSUD ramah anak, lansia, dan disabilitas.	
		Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia	a. Pemanfaatan Aplikasi MEWS Integrated yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan pada FKTP dan FKRTL sebagai deteksi dini terhadap kegawatdaruratan maternal b. Penguatan pemantauan kesehatan ibu hamil serta pertumbuhan dan perkembangan anak oleh tenaga kesehatan c. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan homecare	
		Penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan	a. Digitalisasi pelayanan kesehatan dan integrasi data melalui platform Satu	

		infrastruktur layanan kesehatan primer dan rujukan	Sehat dan Rekam Medis Elektronik b. Peningkatan pelayanan sistem administrasi rumah sakit secara elektronik	
		Percepatan pencegahan penurunan stunting, dan peningkatan gizi masyarakat terutama Gizi Ibu hamil dan balita.	a. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Lokal bagi ibu hamil KEK dan Balita Stunting. b. Pengembangan Aplikasi Digital “Super App Stunting” sebagai pusat digital terpadu yang menggabungkan edukasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pelaporan data, hingga fitur untuk para kader dan orang tua, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan menyediakan data akurat untuk penanganan stunting. c. Inovasi Layanan Kesehatan Berbasis Komunitas dengan dukungan lintas sektor dan stakeholder terkait d. Intervensi gizi spesifik berdasarkan siklus hidup pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dan wanita usia subur	
		Mendukung Terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	a. Pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan siap saji di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) b. Inspeksi kesehatan lingkungan pada SPPG c. Pengambilan sampel air pada SPPG dalam rangka pengawasan kualitas air minum d. Pengawasan keamanan pangan siap saji pada SPPG e. Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC)	
		Peningkatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Yani dan RSUD Sumber Sari Bantul.	a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui upaya promotif (melalui program dan kegiatan pelayanan instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit), preventif, kuratif, dan rehabilitatif b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan alat kesehatan,	

			pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis, serta peningkatan kompetensi SDM RS sesuai standar sebagai upaya peningkatan status RSUD Sumbersari tipe D menjadi tipe C. c. Peningkatan kapasitas RSUD Ahmad Yani untuk memenuhi standar sebagai RS Rujukan Regional dan pemenuhan pelayanan KJSU. d. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi dan RS Pendidikan Satelit	
		Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat berbasis komunitas, termasuk percepatan akses air minum, sanitasi layak, serta penguatan Kelurahan Sehat	a. Kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi masyarakat melalui Forum Kota Sehat b. Inspeksi kesehatan lingkungan pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat-Tempat Kerja (TTK), sarana pendidikan, dan tempat-tempat umum lainnya	
		Perluasan screening kesehatan sedini mungkin melalui pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.	a. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah (SD, SMP dan SMA) b. Skrining Bayi Baru Lahir dan Balita c. Kunjungan rumah dan edukasi pada masyarakat yang belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis	
		Eliminasi penyakit menular melalui intervensi terintegrasi lintas sektor dan berbasis budaya lokal	a. Penguatan regulasi tentang Kesiapsiagaan Antisipasi Peningkatan Kasus DBD, HIV AIDS, dan penyakit menular lainnya b. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pamong serta Kader dalam penyebaran pesan kesehatan.	
		Peningkatan program pencegahan dan pengobatan TB dengan memperluas cakupan penemua,	a. Dukungan regulasi melalui Peraturan Walikota Metro tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis b. Peningkatan kapasitas SDM Tim Percepatan	

		pemeriksaan dan pengobatan TB.	Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB)	
		Meningkatkan kapasitas sistem pemantauan kesehatan untuk mendeteksi, melacak, dan merespons epidemi secara cepat.	a. Penguatan Sistem Surveilans Berbasis Fasilitas Kesehatan dan pemantauan rutin terhadap indikator penyakit prioritas. b. Membangun tim respons cepat (*rapid response team*) yang siaga menangani lonjakan kasus.	
		Perluasan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat, terutama masyarakat rentan yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus.	a. Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan kepada peserta BPJS Kelas III bersumber dana APBD b. Mempermudah akses pelayanan kepesertaan JKN bagi masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik	
		Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan	a. Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk membagikan materi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kesehatan b. Menyusun kurikulum muatan lokal tentang kesehatan bersama Dinas Pendidikan.	
		Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dan memastikan distribusi serta pemanfaatan optimal sumber daya manusia kesehatan yang merata	a. Penguatan perencanaan kebutuhan, pemerataan pemenuhan kebutuhan, serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan b. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan termasuk ketersediaan alat kesehatan, farmasi dan laboratorium kesehatan.	a. Peningkatan pelayanan kefarmasian, obat esensial, dan vaksin pada fasilitas layanan kesehatan primer b. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) untuk mengantisipasi penyakit *emerging infectious disease*	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam pembangunan kesehatan dirumuskan berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kota Metro, serta megacu kepada Rencana Induk Program Kesehatan (RIBK), program prioritas Provinsi Lampung, dan kesepakatan internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai selama tahun 2025 – 2029, Dinas Kesehatan Kota Metro telah menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Peningkatan Pelayanan BLUD

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
d. Pengembangan Rumah Sakit
e. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
q. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
s. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
u. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
v. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
w. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
x. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
y. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
z. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
aa. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
bb. Operasional Pelayanan Puskesmas
cc. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
dd. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
ee. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
ff. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
c. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
a. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

4.1 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4.2 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

4.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan diselenggarakan selama tahun 2025-2029 perlu dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Metro. Rencana program prioritas perlu mencakup indikator keluaran program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu. Indikator keluaran program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan diimplementasikan, baik yang bersifat substantif maupun penunjang, merupakan bagian integral dari upaya kolektif dalam mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan kesehatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra melibatkan beberapa langkah, yaitu: identifikasi permasalahan, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta penetapan indikator kinerja seperti tabel berikut:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik layanan kesehatan				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
					Cakupan Keaktifan Peserta JKN (%)		
					Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)		
					Cakupan Notifikasi Kasus TB (%)		
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
		Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit yang berkualitas			Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*) ((%))		
					Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup)		
					Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 – PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
				Cakupan Penyediaan Layanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Izin	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				rangka Promotif Preventif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.			Nilai Sakip SKPD (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)		
					Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)		
					persentase pemenuhan jasa penunjang dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan daerah (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, pendanaan, serta target kinerja pembangunan kesehatan terukur yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Metro selama tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Metro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				426.170.554.552,00		442.662.626.572,00		445.515.063.694,00		452.009.645.205,00		470.950.407.694,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				350.023.636.266,00		356.619.535.966,00		359.393.926.666,00		361.101.605.220,00		368.763.645.374,00		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	persentase pemenuhan jasa penunjang dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan daerah (%)	100	100	350.023.636.266,00	100	356.619.535.966,00	100	359.393.926.666,00	100	361.101.605.220,00	100	368.763.645.374,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.973.450,00		156.099.696,00		161.261.696,00		164.457.133,90		167.776.876,60		
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	92.973.450,00	1	156.099.696,00	1	161.261.696,00	1	164.457.133,90	1	167.776.876,60		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.004.450,00		35.700.000,00		36.414.000,00		37.142.280,00		37.885.125,60		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	24.004.450,00	5	35.700.000,00	5	36.414.000,00	5	37.142.280,00	5	37.885.125,60		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.067.500,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.067.500,00	2	20.400.000,00	2	20.808.000,00	2	21.224.160,00	2	21.648.643,20		
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00		20.399.696,00		20.807.696,00		21.224.053,90		21.648.535,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	20.399.696,00	2	20.807.696,00	2	21.224.053,90	2	21.648.535,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17.901.800,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	17.901.600,00	4	30.600.000,00	4	31.212.000,00	4	31.836.240,00	4	32.472.964,80		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.979.700,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		54.121.608,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	25.979.700,00	1	51.000.000,00	1	52.020.000,00	1	53.060.400,00	1	54.121.608,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.166.656.602,00		80.376.342.065,70		82.393.906.906,40		82.721.767.065,10		89.016.026.875,90		
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	79.166.656.602,00	4	80.376.342.065,70	4	82.393.906.906,40	4	82.721.767.065,10	4	89.016.026.875,90		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.090	1.090		1.090		1.090		1.090		1.090			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				75.422.473.341,00		76.953.330.562,70		78.930.997.173,30		79.189.617.117,50		85.413.213.506,90		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.090	1.090	75.422.473.341,00	1.090	76.953.330.562,70	1.090	78.930.997.173,30	1.090	79.189.617.117,50	1.090	85.413.213.506,90		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.702.686.211,00		3.334.417.944,00		3.401.106.302,90		3.469.126.428,90		3.538.510.997,50		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	3.702.686.211,00	1	3.334.417.944,00	1	3.401.106.302,90	1	3.469.126.428,90	1	3.538.510.997,50		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				22.799.250,00		30.324.600,00		30.931.092,00		31.549.713,60		32.180.706,10		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	22.799.250,00	1	30.324.600,00	1	30.931.092,00	1	31.549.713,60	1	32.180.706,10		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16.699.800,00		30.266.959,00		30.874.338,20		31.491.824,90		32.121.661,40		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	16.699.800,00	4	30.266.959,00	4	30.874.338,20	4	31.491.824,90	4	32.121.661,40		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				77.682.600,00		81.600.000,00		83.232.000,00		84.896.640,00		86.594.572,80		
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	77.682.600,00	1	81.600.000,00	1	83.232.000,00	1	84.896.640,00	1	86.594.572,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30		30		30		30		30			
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				39.399.200,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	39.399.200,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.964,80		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				21.497.600,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	21.497.600,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.964,80		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16.756.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,20		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	16.756.000,00	30	20.400.000,00	30	20.808.000,00	30	21.224.160,00	30	21.648.643,20		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				334.210.700,00		467.956.660,00		477.317.833,20		486.864.189,80		496.601.473,60		
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	334.210.700,00	2	467.956.660,00	2	477.317.833,20	2	486.864.189,80	2	496.601.473,60		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	79	79		79		79		79		79			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	42		42		42		42		42			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.001.000,00		15.300.000,00		15.606.000,00		15.918.120,00		16.236.482,40		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.001.000,00	1	15.300.000,00	1	15.606.000,00	1	15.918.120,00	1	16.236.482,40		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.019.000,00		96.636.760,00		98.773.495,20		100.748.965,10		102.763.944,40		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	71.019.000,00	5	96.636.760,00	5	98.773.495,20	5	100.748.965,10	5	102.763.944,40		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.762.700,00		45.147.060,00		49.110.001,20		50.092.201,20		51.094.045,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	31.762.700,00	2	46.147.060,00	2	49.110.001,20	2	50.092.201,20	2	51.094.045,20		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				120.000.000,00		122.400.000,00		124.848.000,00		127.344.960,00		129.891.859,20		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	79	79	120.000.000,00	79	122.400.000,00	79	124.848.000,00	79	127.344.960,00	79	129.891.859,20		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.426.000,00		154.674.640,00		157.768.336,80		160.923.703,50		164.142.177,60		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	42	83.426.000,00	42	154.674.640,00	42	157.768.336,80	42	160.923.703,50	42	164.142.177,60		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.964,80		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		3.752.400.684,00		2.695.448.696,70		2.953.357.672,70		3.012.424.826,10		
Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	99	79	100.000.000,00	79	3.752.400.684,00	60	2.695.448.696,70	60	2.953.357.672,70	79	3.012.424.826,10		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		3.752.400.684,00		2.695.448.696,70		2.953.357.672,70		3.012.424.826,10		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	99	79	100.000.000,00	79	3.752.400.684,00	60	2.695.448.696,70	60	2.953.357.672,70	79	3.012.424.826,10		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.450.716,00		260.959.730,30		266.578.924,90		292.310.503,40		296.156.713,50		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		273.450.716,00	1	260.959.730,30	1	266.578.924,90	1	292.310.503,40	1	296.156.713,50		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,60		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.404.000,00	1	10.612.080,00	1	10.824.321,60		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				265.450.716,00		270.759.730,30		276.174.924,90		281.696.423,40		287.332.391,90		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		265.450.716,00	1	270.759.730,30	1	276.174.924,90	1	281.696.423,40	1	287.332.391,90		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.202.000,00		451.454.040,00		460.483.120,80		469.692.783,20		479.086.639,00		
Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	3	443.202.000,00	3	451.454.040,00	3	460.483.120,80	3	469.692.783,20	3	479.086.639,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	130		130		130		130		130			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.430.000,00		45.563.400,00		46.474.668,00		47.404.161,40		48.352.244,60		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	45.430.000,00	1	45.563.400,00	1	46.474.668,00	1	47.404.161,40	1	48.352.244,60		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				227.520.000,00		225.093.600,00		229.595.472,00		234.187.381,40		238.871.129,10		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	227.520.000,00	6	225.093.600,00	6	229.595.472,00	6	234.187.381,40	6	238.871.129,10		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.302.000,00		29.888.040,00		30.485.800,80		31.095.516,80		31.717.427,20		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	3	29.302.000,00	3	29.888.040,00	3	30.485.800,80	3	31.095.516,80	3	31.717.427,20		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		71.400.000,00		72.828.000,00		74.284.560,00		75.770.251,20		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	70.000.000,00	1	71.400.000,00	1	72.828.000,00	1	74.284.560,00	1	75.770.251,20		
1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.950.000,00		79.509.000,00		81.099.180,00		82.721.163,60		84.375.586,90		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	130	67.950.000,00	130	79.509.000,00	130	81.099.180,00	130	82.721.163,60	130	84.375.586,90		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				269.535.460.000,00		271.246.720.555,00		272.635.695.306,00		273.926.409.211,90		275.226.977.396,50		
Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	13	13	269.535.460.000,00	13	271.246.720.555,00	13	272.635.695.306,00	13	273.926.409.211,90	13	275.226.977.396,50		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				269.535.460.000,00		271.246.720.555,00		272.635.695.306,00		273.926.409.211,90		275.226.977.396,50		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	13	13	269.535.460.000,00	13	271.246.720.555,00	13	272.635.695.306,00	13	273.926.409.211,90	13	275.226.977.396,50		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				75.153.426.464,00		83.097.163.040,00		86.074.906.301,00		87.600.299.243,00		96.996.669.777,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	14,6	12	75.153.426.464,00	11	83.097.163.040,00	10	86.074.906.301,00	10	87.600.299.243,00	9	96.996.669.777,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				41.230.612.864,00		43.206.471.426,00		45.296.640.654,30		46.206.466.467,30		56.570.962.406,30		
Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	41.230.612.864,00	1	43.206.471.426,00	1	45.296.640.654,30	1	46.206.466.467,30	2	56.570.962.406,30		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	662		662		662		662		662			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	13	13		10		10		10		10			
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	17.170	27.059		30.701		30.701		32.507		32.507			
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	140	145		145		150		150		150			
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.150.000.000,00		1.173.000.000,00		1.196.460.000,00		1.220.389.200,00		1.244.796.984,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	13	13	1.150.000.000,00	10	1.173.000.000,00	10	1.196.460.000,00	10	1.220.389.200,00	10	1.244.796.984,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				29.904.589.916,00		29.266.961.714,00		31.076.321.346,00		31.701.742.591,00		32.335.777.443,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	662	29.904.589.916,00	662	29.266.961.714,00	662	31.076.321.346,00	662	31.701.742.591,00	662	32.335.777.443,00		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				127.752.550,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.824,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	140	145	127.752.550,00	145	153.000.000,00	150	156.060.000,00	150	159.181.200,00	150	162.364.824,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				6.344.003.616,00		7.926.672.915,00		8.087.450.373,40		8.249.199.380,70		17.854.547.917,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	6.344.003.616,00	1	7.926.872.915,00	1	8.667.450.373,40	1	8.249.199.360,70	2	17.654.547.917,40		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3.676.262.600,00		4.640.716.797,00		4.733.531.132,90		4.626.201.755,60		4.924.765.790,70		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	3.676.262.600,00	2	4.640.716.797,00	2	4.733.531.132,90	2	4.626.201.755,60	2	4.924.765.790,70		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				26.004.000,00		45.900.000,00		46.818.000,00		47.754.360,00		48.709.447,20		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	17.170	27.059	26.004.000,00	30.701	45.900.000,00	30.701	46.818.000,00	32.507	47.754.360,00	32.507	48.709.447,20		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33.704.766.300,00		39.434.626.414,00		40.315.120.962,70		41.121.423.402,40		41.943.851.870,40		
Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	90.041	113.673	33.704.766.300,00	113.673	39.434.626.414,00	113.673	40.315.120.962,70	113.673	41.121.423.402,40	113.673	41.943.851.870,40		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.575	21.296		21.296		21.296		21.296		21.296			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.265	35.760		35.760		35.760		35.760		35.760			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.152	4.244		4.244		4.244		4.244		4.244			
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	10.310	10.700		11.200		11.250		11.400		11.500			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	303	302		302		302		302		302			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	4.190	3.254		2.911		2.625		2.409		2.246			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5.115	5.627		6.190		6.809		7.489		8.238			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.601	2.926		2.926		2.926		2.926		2.926			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.673	2.910		2.910		2.910		2.910		2.910			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	44		44		44		44		44			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	11	11		11				11		11			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	53	56		57		58		59		60			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24.720	25.476		25.476		25.476		25.476		25.476			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.100	13.696		13.696		13.696		13.696		13.696			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.632	2.769		2.769		2.769		2.769		2.769			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				79.562.600,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.801	2.926	79.562.600,00	2.926	102.000.000,00	2.926	104.040.000,00	2.926	106.120.800,00	2.926	108.243.216,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				22.647.400,00		42.640.000,00		43.696.800,00		44.570.736,00		45.462.150,70		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.673	2.910	22.647.400,00	2.910	42.640.000,00	2.910	43.696.800,00	2.910	44.570.736,00	2.910	45.462.150,70		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				41.108.500,00		64.770.000,00		66.065.400,00		67.386.708,00		68.734.442,20		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2.632	2.769	41.108.500,00	2.769	64.770.000,00	2.769	66.065.400,00	2.769	67.386.708,00	2.769	68.734.442,20		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				49.006.400,00		71.399.696,00		72.827.696,00		74.284.453,90		75.770.143,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6.100	13.696	49.006.400,00	13.696	71.399.696,00	13.696	72.827.696,00	13.696	74.284.453,90	13.696	75.770.143,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				16.343.000,00		36.509.064,00		37.239.245,30		37.984.030,20		38.743.710,60		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24.720	25.476	16.343.000,00	25.476	36.509.064,00	25.476	37.239.245,30	25.476	37.984.030,20	25.476	38.743.710,60		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				7.664.400,00		13.464.000,00		13.733.280,00		14.007.945,60		14.288.104,50		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	90.041	113.673	7.664.400,00	113.673	13.464.000,00	113.673	13.733.280,00	113.673	14.007.945,60	113.673	14.288.104,50		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				35.605.000,00		49.669.300,00		50.663.086,00		51.696.747,70		52.730.682,70		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.575	21.296	35.605.000,00	21.296	49.689.300,00	21.296	50.683.086,00	21.296	51.696.747,70	21.296	52.730.682,70		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				264.692.000,00		449.720.040,00		458.714.440,80		467.888.729,60		477.246.504,20		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.265	35.760	264.692.000,00	35.760	449.720.040,00	35.760	458.714.440,80	35.760	467.888.729,60	35.760	477.246.504,20		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				662.424.600,00		661.301.044,00		694.927.064,90		706.825.606,20		723.002.118,30		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.182	4.244	662.424.600,00	4.244	661.301.044,00	4.244	694.927.064,90	4.244	706.825.606,20	4.244	723.002.118,30		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				23.359.200,00		40.600.000,00		41.616.000,00		42.446.320,00		43.297.286,40		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	303	302	23.359.200,00	302	40.600.000,00	302	41.616.000,00	302	42.446.320,00	302	43.297.286,40		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				73.607.600,00		606.409.360,00		616.537.567,60		630.905.319,00		643.526.465,30		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	4.190	3.264	73.607.600,00	2.911	606.409.360,00	2.625	616.537.567,60	2.409	630.905.319,00	2.246	643.526.465,30		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				20.570.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5.115	5.627	20.570.000,00	6.190	30.600.000,00	6.809	31.212.000,00	7.489	31.836.240,00	8.238	32.472.964,80		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				26.894.300,00		35.700.000,00		36.414.000,00		37.142.280,00		37.885.125,60		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	26.894.300,00	1	35.700.000,00	1	36.414.000,00	1	37.142.280,00	1	37.885.125,60		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				43.330.000,00		46.869.000,00		47.806.380,00		48.762.507,60		49.737.757,80		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	43.330.000,00	1	46.869.000,00	1	47.806.380,00	1	48.762.507,60	1	49.737.757,80		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				39.424.000,00		40.212.480,00		41.016.729,60		41.837.064,20		42.673.805,50		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	39.424.000,00	1	40.212.480,00	1	41.016.729,60	1	41.837.064,20	1	42.673.805,50		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				56.416.900,00		122.400.000,00		124.848.000,00		127.344.960,00		129.891.859,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	56.416.900,00	1	122.400.000,00	1	124.848.000,00	1	127.344.960,00	1	129.891.859,20		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				391.439.400,00		417.030.060,00		425.370.661,20		433.878.074,40		442.555.635,90		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	391.439.400,00	1	417.030.060,00	1	425.370.661,20	1	433.878.074,40	1	442.555.635,90		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				16.750.000,00		25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.200,00		27.060.804,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	16.750.000,00	1	25.500.000,00	1	26.010.000,00	1	26.530.200,00	1	27.060.804,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				66.693.500,00		108.573.064,00		110.744.545,70		112.959.436,60		115.218.625,30		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	66.693.500,00	1	108.573.064,00	1	110.744.545,70	1	112.959.436,60	1	115.218.625,30		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				24.276.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	53	56	24.276.000,00	57	30.600.000,00	58	31.212.000,00	59	31.836.240,00	60	32.472.964,80		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.097.230.000,00		1.119.174.600,00		1.141.558.092,00		1.164.389.253,80		1.187.677.038,90		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	1.097.230.000,00	1	1.119.174.600,00	1	1.141.558.092,00	1	1.164.389.253,80	1	1.187.677.038,90		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				21.210.168.000,00		25.160.701.342,00		25.664.315.368,80		26.196.001.676,20		26.721.961.709,70		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	21.210.168.000,00	1	25.160.701.342,00	1	25.664.315.368,80	1	26.196.001.676,20	1	26.721.961.709,70		
1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				24.711.300,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	10.310	10.700	24.711.300,00	11.200	30.600.000,00	11.250	31.212.000,00	11.400	31.836.240,00	11.500	32.472.964,80		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				63.900.100,00		122.400.000,00		124.848.000,00		127.344.960,00		129.891.859,20		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	63.900.100,00	1	122.400.000,00	1	124.848.000,00	1	127.344.960,00	1	129.891.859,20		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				18.490.700,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	13	13	15.490.700,00	13	30.600.000,00	13	31.212.000,00	13	31.836.240,00	13	32.472.964,80		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.850.000.000,00		2.164.273.492,00		2.227.958.961,60		2.272.518.141,10		2.317.968.503,90		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	2	1.850.000.000,00	2	2.164.273.492,00	2	2.227.958.961,60	2	2.272.518.141,10	2	2.317.968.503,90		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				6.777.145.300,00		6.912.687.900,00		7.050.941.658,00		7.191.960.491,20		7.335.799.701,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	11	11	6.777.145.300,00	11	6.912.687.900,00		7.050.941.658,00	11	7.191.960.491,20	11	7.335.799.701,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				330.000.000,00		465.944.880,00		567.063.778,00		578.405.053,60		589.973.154,60		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	11	11	330.000.000,00	11	465.944.880,00	11	567.063.778,00	11	578.405.053,60	11	589.973.154,60		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				15.913.700,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,80		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	44	15.913.700,00	44	30.600.000,00	44	31.212.000,00	44	31.836.240,00	44	32.472.964,80		
1.02.02.2.02.0036 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				166.646.700,00		193.600.000,00		197.676.000,00		201.629.520,00		205.662.110,40		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	166.646.700,00	1	193.600.000,00	1	197.676.000,00	1	201.629.520,00	1	205.662.110,40		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				144.567.500,00		147.456.850,00		150.405.027,00		153.416.157,50		156.484.511,30		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	144.567.500,00	1	147.456.850,00	1	150.405.027,00	1	153.416.157,50	1	156.484.511,30		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				50.000.000,00		71.400.000,00		72.828.000,00		74.284.560,00		75.770.251,20		
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	71.400.000,00	1	72.828.000,00	1	74.284.560,00	1	75.770.251,20		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				50.000.000,00		71.400.000,00		72.828.000,00		74.284.560,00		75.770.251,20		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	71.400.000,00	1	72.828.000,00	1	74.284.560,00	1	75.770.251,20		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				165.025.300,00		382.663.200,00		390.316.464,00		398.122.793,30		406.085.249,10		
Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Izin	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	165.025.300,00	1	382.663.200,00	1	390.316.464,00	1	398.122.793,30	1	406.085.249,10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	99	99		99		99		99		99			
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	20	25		30		30		35		40			
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110.253.500,00		265.763.200,00		291.475.464,00		297.305.033,30		303.254.193,90		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	20	25	110.253.500,00	30	265.763.200,00	30	291.475.464,00	35	297.305.033,30	40	303.254.193,90		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				34.799.700,00		61.200.000,00		62.424.000,00		63.672.480,00		64.945.929,60		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	99	99	34.799.700,00	99	61.200.000,00	99	62.424.000,00	99	63.672.480,00	99	64.945.929,60		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				22.972.100,00		35.700.000,00		36.414.000,00		37.142.280,00		37.885.125,60		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	22.972.100,00	1	35.700.000,00	1	36.414.000,00	1	37.142.280,00	1	37.885.125,60		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				713.030.500,00		760.922.120,00		786.340.562,00		802.067.374,00		818.108.721,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	55	60	713.030.500,00	90	760.922.120,00	90	786.340.562,00	95	802.067.374,00	95	818.108.721,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				83.266.500,00		113.161.240,00		115.444.565,00		117.753.763,00		120.108.838,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	83.266.500,00	1	113.161.240,00	1	115.444.565,00	1	117.753.763,00	1	120.108.838,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				17.324.600,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.965,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	17.324.600,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.965,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				65.961.700,00		82.561.240,00		84.232.565,00		85.917.523,00		87.635.873,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	65.961.700,00	1	62.561.240,00	1	64.232.565,00	1	65.917.523,00	1	67.635.673,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				629.744.000,00		647.740.550,00		670.895.697,00		694.313.611,00		697.999.553,00		
Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	120	160	629.744.000,00	170	647.740.550,00	180	670.895.697,00	190	694.313.611,00	200	697.999.553,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				629.744.000,00		647.740.550,00		670.895.697,00		694.313.611,00		697.999.553,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	120	160	629.744.000,00	170	647.740.550,00	180	670.895.697,00	190	694.313.611,00	200	697.999.553,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				216.535.300,00		75.750.000,00		77.643.750,00		79.584.844,00		81.574.465,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL (%)	100	100	216.535.300,00	100	75.750.000,00	100	77.643.750,00	100	79.584.844,00	100	81.574.465,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				16.792.200,00		34.950.000,00		35.649.000,00		36.361.980,00		37.089.220,00		
Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	16.792.200,00	1	34.950.000,00	1	35.649.000,00	1	36.361.980,00	1	37.089.220,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				16.792.200,00		34.950.000,00		35.649.000,00		36.361.980,00		37.089.220,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	16.792.200,00	1	34.950.000,00	1	35.649.000,00	1	36.361.980,00	1	37.089.220,00		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				10.200.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	10.200.000,00	1	20.400.000,00	1	20.808.000,00	1	21.224.160,00	1	21.648.643,00		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				10.200.000,00		20.400.000,00		20.808.000,00		21.224.160,00		21.648.643,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	1	10.200.000,00	1	20.400.000,00	1	20.808.000,00	1	21.224.160,00	1	21.648.643,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				159.543.100,00		20.400.000,00		21.186.750,00		21.995.704,00		22.836.602,00		
Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	40	45	159.543.100,00	45	20.400.000,00	45	21.186.750,00	50	21.995.704,00	50	22.836.602,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				159.543.100,00		20.400.000,00		21.186.750,00		21.995.704,00		22.836.602,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	40	45	159.543.100,00	45	20.400.000,00	45	21.186.750,00	50	21.995.704,00	50	22.836.602,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.063.724.000,00		2.109.457.446,00		2.182.246.595,00		2.225.891.527,00		2.270.409.357,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0,71	1	2.063.724.000,00	1	2.109.457.446,00	1	2.182.246.595,00	1	2.225.891.527,00	1	2.270.409.357,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245.167.400,00		460.579.936,00		490.191.535,00		499.995.366,00		509.995.273,00		
Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	245.167.400,00	1	460.579.936,00	1	490.191.535,00	1	499.995.366,00	1	509.995.273,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				245.167.400,00		460.579.936,00		490.191.535,00		499.995.366,00		509.995.273,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	245.167.400,00	1	460.579.936,00	1	490.191.535,00	1	499.995.366,00	1	509.995.273,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19.996.600,00		40.600.204,00		41.616.205,00		42.446.532,00		43.297.503,00		
Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	19.996.600,00	1	40.600.204,00	1	41.616.205,00	1	42.446.532,00	1	43.297.503,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	30	30		30		30		30		35			
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				14.996.600,00		30.600.204,00		31.212.205,00		31.836.452,00		32.473.181,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	14.996.600,00	1	30.600.204,00	1	31.212.205,00	1	31.836.452,00	1	32.473.181,00		
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.322,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	30	30	5.000.000,00	30	10.200.000,00	30	10.404.000,00	30	10.612.080,00	35	10.824.322,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.795.560.000,00		1.566.077.306,00		1.650.436.652,00		1.683.447.629,00		1.717.116.581,00		
Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	1.795.560.000,00	1	1.566.077.306,00	1	1.650.436.652,00	1	1.683.447.629,00	1	1.717.116.581,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.795.560.000,00		1.566.077.306,00		1.650.436.652,00		1.683.447.629,00		1.717.116.581,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	1.795.560.000,00	1	1.566.077.306,00	1	1.650.436.652,00	1	1.683.447.629,00	1	1.717.116.581,00		

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan RPJMD, yang berfungsi sebagai pendorong utama pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Metro Tahun 2025–2030. Program-program ini dipilih secara selektif berdasarkan urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap isu-isu strategis serta kebutuhan nyata masyarakat. Subkegiatan prioritas Dinas Kesehatan Kota Metro dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan	

			Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
3.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.4 Indikator Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro

Kinerja penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2025–2029 diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat untuk mengarahkan,

memantau, dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Penentuan IKU dilakukan secara selektif dan strategis, mencerminkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran utama Renstra. IKU yang disajikan merupakan indikator-indikator yang memiliki relevansi tinggi, dapat diukur secara obyektif, dan memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan kesehatan.

Sementara itu, IKK berfokus pada proses, output (keluaran), dan efisiensi kegiatan itu sendiri, seperti kecepatan penyelesaian tugas atau kualitas hasil pekerjaan. Dengan memantau IKK, Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya IKU.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	0	108	108	72	72	72	72	
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	5,0	5,4	5,1	4,8	4,6	4,2	4,0	
3	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persen	9,2	8,7	8,2	7,7	7,2	6,7	6,2	
4	Cakupan notifikasi kasus tuberculosis	Persen	71	72	75	80	85	90	90	
5	Cakupan keaktifan peserta JKN	Persen	83,79	85,74	86,24	86,54	86,74	86,84	87	
6	Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	0	20	50	70	90	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Metro

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	negatif	(per 100.000 kelahiran hidup)	0	108	108	72	72	72	72	
2	Angka Kematian Bayi	negatif	(per 1.000 kelahiran hidup)	5,0	5,4	5,1	4,8	4,6	4,2	4,0	
3	Cakupan Keaktifan Peserta JKN	positif	%	83,79	85,74	86,24	86,54	86,74	86,84	87	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis *(treatment success rate)*	positif	(%)	95,29	90	91	92	93	94	95	
5	Cakupan imunisasi bayi lengkap	positif	Persentase	100	95	95	97	98	99	99	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	positif	(%)	99,76	99,8	99,85	99,85	99,9	99,9	99,95	
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	Angka	84,37	84,65	84,85	85	85,25	85,5	85,75	
9	Nilai SAKIP	positif	Nilai	80,35	80,40	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65	

10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	positif	%	90,9	100	100	100	100	100	100	

21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
23	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	negatif	%	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
24	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	negatif	(%)	14,8	12,1	12	11	10	10	9	
25	Usia Harapan Hidup (UHH)	positif	Tahun	74,39	75,58	75,65	75,69	75,71	75,76	76,52	
26	Angka Kematian Balita	negatif	Per 1.000 Kelahiran	5,39	10	8	7	6	5	5	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Metro merupakan dokumen strategis yang menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2025 – 2029. Dokumen Renstra menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi Dinas Kesehatan Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro berisikan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan dan indikator pencapaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Kesehatan Kota Metro, tetapi dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro juga sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen berbagai stakeholder.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi dan jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Metro, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197203101997031006